

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI

Yunie Rahayu, Ahmad Soleh, Marni

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dari tahun 2011-2021. Penelitian ini menggunakan alat analisis data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2010 sampai tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang terus mengalami peningkatan. Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2010 sampai tahun 2021 dimana setiap tahunnya tingkat kemiskinan cenderung mengalami fluktuasi. Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Kata Kunci : IPM, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Kab/Kota di Propinsi Jambi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan menjadi fenomena sepanjang sejarah Indonesia. Kemiskinan telah menjadikan jutaan anak-anak Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas dan kesulitan membiayai kesehatan. Selain itu, kemiskinan juga menyebabkan kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, disertai kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan terbatasnya perlindungan terhadap keluarga. Lebih jauh kemiskinan meningkatkan arus urbanisasi ke kota, dan lebih parah lagi kemiskinan menyebabkan jutaan penduduk tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Kemiskinan menyebabkan banyaknya penduduk yang harus membanting tulang dan mengerahkan seluruh tenaga hanya untuk mendapatkan upah yang mulanya hanya bisa mencukupi untuk kebutuhan makan saja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lain (Bappenas).

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (a) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (b) hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum (c) hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (d) hak rakyat untuk akses atas kebutuhan hidup (sandang, papan dan pangan) yang terjangkau; (e) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (f) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (g) hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (h) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan public dan pemerintahan; (i) hak rakyat berinovasi; (j) hak rakyat untuk menjalankan hubungan sipiritualnya dengan Tuhan, dan (k) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintah dengan baik (Bappenas).

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan makro yang dihadapi setiap wilayah. Pengukuran tingkat kemiskinan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya perlu untuk diketahui untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang

pada akhirnya meningkatkan pendapatan perkapita suatu daerah maka akan meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Pembangunan dikatakan berhasil jika terjadi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan per kapita, tingkat pengangguran rendah, berkurangnya jumlah penduduk miskin dan distribusi pendapatan yang semakin merata. Jadi salah satu indikator berhasilnya pembangunan adalah ditunjukkan oleh indikator kemiskinan. Sehingga sasaran utama dari pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Seluruh masyarakat akan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi melalui *trickle down effect* (efek tetesan kebawah). Peningkatan kekayaan para investor akan disertai tetesan kekayaan mereka ke lapisan masyarakat bawah, bentuk manfaat yang diperoleh masyarakat dengan tetesan kemakmuran orang-orang kaya tersebut misalnya upah yang mereka dapatkan sebagai buruh pabrik. Tetesan kemakmuran inilah yang diyakini bisa memecahkan permasalahan kemiskinan. Pendapat ini sampai dengan akhir tahun 1960-an.

Memasuki tahun 1970-an, para ahli ekonomi mulai meragukan manfaat pertumbuhan Produk Domestik Bruto karena di banyak negara sedang berkembang meskipun standar kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang stabil, tetapi terdapat gejala meningkatnya kemiskinan absolute, ketimpangan distribusi pendapatan, dan pengangguran. Kemudian muncul pendapat jika peningkatan pembangunan tersebut tidak dilakukan secara merata mustahil akan memberikan hasil yang maksimal.

Dengan semakin berkembangnya pendapat bahwa pembangunan ekonomi akan memberikan hasil yang maksimal jika peningkatan produk domestik bruto diikuti dengan perbaikan kualitas standar hidup seluruh masyarakat termasuk masyarakat yang berpendapatan rendah. Para ahli ekonomi mulai menganalisis dan mempelajari variable-variabel ekonomi makro tertentu yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Menurut Khandker dan Haughton (2012) diperlukan penjelasan logis mengapa beberapa orang tergolong miskin bila kita ingin memberantas akar masalah kemiskinan. Ada beberapa penyebab utama yang berhubungan dengan kemiskinan seperti karakteristik wilayah, karakteristik masyarakat, karakteristik rumah tangga, dan individu. Pada tingkat wilayah banyak sekali sifat yang bisa dihubungkan dengan kemiskinan. Kemiskinan yang tinggi terjadi pada daerah dengan isolasi geografi, basis sumber daya rendah, kerentanan terhadap bencana serta institusi domestik. Pada tingkat masyarakat, infrastruktur merupakan faktor penentu utama kemiskinan. Kualitas jalan, ketersediaan listrik, akses ke pasar, ketersediaan sarana pendidikan, dan kesehatan mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan wilayah dan kemiskinan suatu daerah. Struktur rumah tangga seringkali berbeda antara rumah tangga miskin dan tidak miskin. Jumlah anggota rumah tangga, struktur usia, dan rasio ketergantungan menjadi penentu kesejahteraan suatu rumah tangga.

Kemiskinan menyebar secara tidak merata antarnegara atau antardaerah dalam suatu Negara. Kemiskinan biasanya berpusat di daerah pedesaan atau daerah yang kurang sumber daya. Beban kemiskinan yang terbesar juga pada kelompok-kelompok tertentu yaitu wanita dan anak-anak. Indikator kemiskinan yang digunakan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolute. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi garis kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin.

Masalah kemiskinan juga dapat dilihat dari tiga indikator, yang pertama adalah tingkat kemiskinan, yang kedua adalah indeks kedalaman kemiskinan dan yang terakhir adalah indeks keparahan kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan perkembangan jumlah penduduk miskin tahun sekarang dibanding tahun sebelumnya. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan merupakan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* – P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (BPS, 2013). Untuk melihat jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 1.1

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi. Seharusnya jumlah penduduk miskin setiap tahunnya dapat diturunkan. Hal ini diduga disebabkan oleh indeks pembangunan manusia (IPM). Menurut Mulyaningsih (2008), IPM memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*Longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*), untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Lanjouwet al.(2001) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Sejalan dengan pendapat tersebut, penelitian yang dilakukan Suliswanto (2010) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Ribuan Jiwa)

Kabupaten/Kota	Tahun (Ribuan Jiwa)						Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kerinci	17,62	17,62	16,79	17,00	17,48	18,45	17,49
Merangin	32,88	33,92	33,95	32,88	33,92	35,44	33,83
Sarolangun	26,37	25,61	25,7	25,39	25,79	27,06	25,99
Batanghari	28,39	27,49	27,55	26,53	26,54	27,24	27,29
Muaro Jambi	17,52	18,28	17,38	16,86	17,3	20,49	17,97
Tanjung Jabung Timur	27,42	27,22	26,99	25,35	24,23	24,42	25,94
Tanjung Jabung Barat	37,24	36,33	36,28	35,12	34,78	36,1	35,98
Tebo	23,04	23,18	22,86	22,83	22,47	23,77	23,03
Bungo	20,96	20,81	21,11	20,87	33,07	23,64	23,41

Kota Jambi	51,61	52,08	50,61	48,95	50,44	54,23	51,32
Sungai Penuh	2,75	2,46	2,48	2,55	2,78	3,03	2,68
Provinsi Jambi	289,81	286,55	281,69	274,32	277,8	293,86	284,01
Rata-Rata	25,98	25,91	25,61	24,94	26,25	26,72	25,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Jambi, Publikasi tahun 2017- 2022

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa IPM di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2016 sampai tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan. Seharusnya meningkatnya IPM dapat menurunkan angka kemiskinan, hal ini diduga ada terjadi keraguan dengan teori peningaktan IPM dapat mengurangi kemiskinan, sehingga penelitian ini harus diteliti lebih lanjut.

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota Provinsi Jambi 2016-2021

Kabupaten /Kota	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kerinci	69,7	70	70,6	71	71,2	71,45
Merangin	67,9	68,3	68,8	69,1	69,2	69,53
Sarolangun	68,7	69	69,4	69,7	69,9	70,25
Batang Hari	68,7	68,9	69,3	69,7	69,8	70,11
Muaro Jambi	67,6	67,9	68,3	69	69,2	69,55
Tanjabtlim	61,9	62,6	63,3	63,9	64,4	64,91
Tanjabbar	65,9	66,2	67,1	67,5	67,5	68,16
Tebo	68,1	68,2	68,7	69	69,1	69,35
Bungo	68,8	69	69,4	69,9	69,9	70,15
Kota Jambi	76,1	76,7	77,4	78,3	78,4	79,12
Kota Sungai Penuh	73,4	73,8	74,7	75,4	75,4	75,7
Provinsi Jambi	68,8	69,1	69,7	70,2	70,4	71,63

Sumber: BPS Provinsi Jambi, Publikasi Tahun 2017 - 2022

Dari uraian diatas, kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jambi dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan yang masih mengalami fluktuasi. Kesenjangan indeks kedalaman kemiskinan terjadi dipengaruhi oleh IPM yang bervariasi pada setiap daerah.

LANDASAN TEORI

Teori Kemiskinan

Kemiskinan dapat dicirikan keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga Negara (Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN). Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat

kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

Menurut Chambers (1998) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Kemiskinan dapat dibagi dengan empat bentuk (Suryawati, 2005), yaitu: (1) kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja; (2) kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; (3) kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar; (4) kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2004), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antar wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis ukuran penduduk, ukuran ini sering disebut juga dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki garis kemiskinan dibawah maka dinyatakan dalam kondisi miskin.

Menurut Sayogyo dalam Suryawati (2005), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan.

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2010) sebagai berikut :

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas nya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berate produktivitasnya juga akan rendah, upahnya nya pun rendah.
3. kemiskinan muncul karena adanya akses modal. Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) lihat gambar 2.1. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya

pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, redahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.



because it is poor). Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “Suatu Negara menjadi miskin karena ia merupakan Negara miskin” (A country is poor because is poor).

Menurut pendapatnya inti dari lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal. Di Negara berkembang kedua faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Jadi, menurut pandangan Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi Negara berkembang mencapai pembangunan yang pesat yaitu.

Konsep Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) dikutip dari BPS (2019). Selanjutnya garis kemiskinan menurut World Bank (2005) adalah standar ukur yang ditetapkan untuk mengukur seseorang dalam kemiskinan. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak, dll). GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Garis kemiskinan ini dibedakan antara perkotaan dan perdesaan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu.

Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan yaitu (BPS, 2019):

1. Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). GKS adalah GK periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
2. GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita/hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.
3. Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi.
4. GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi nonmakanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi.
5. GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita/bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Selanjutnya dihitung jumlah penduduk dibawah GK untuk tingkat kabupaten/kota.
6. Melakukan *prorate* jumlah penduduk miskin kabupaten/kota yang diperoleh pada langkah sebelumnya, terhadap jumlah penduduk miskin propinsi yang dihasilkan dengan menggunakan data Susenas.
7. Dari jumlah penduduk miskin yang diperoleh dari hasil *prorate*, maka dihitung persentase penduduk miskin dan Garis Kemiskinan (GK) dari seluruh kabupaten/kota. Penghitungan GK kabupaten/kota dilakukan sebagai dasar dalam penghitungan indeks kedalaman kemiskinan/*poverty gap index* (P1).

Indikator Kemiskinan

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami seseorang atau sekelompok orang adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh Bappenas (2004). Indikator kemiskinan yang dimaksud adalah :

1. Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
2. Keterbatasan akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya layanan reproduksi, jauhnya jarak fasilitas layanan kesehatan, mahalnya biaya pengobatan dan

perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit.

3. Keterbatasan akses pendidikan. Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahal nya biaya pendidikan, terbatas nya fasilitas pendidikan, rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.
4. Keterbatasan akses pada pekerjaan. Indikator ini diukur dari terbatas nya kesempatan kerja dan berusaha, lemah nya perlindungan terhadap asset usaha, perbedaan upah, lemah nya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan.
5. Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi. Indikator yang digunakan adalah kesulitan memiliki rumah yang sehat dan layak huni, dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak.
6. Keterbatasan akses terhadap air bersih. Indikator yang digunakan adalah sulit nya mendapatkan air bersih, terbatas nya penguasaan sumber air, dan rendahnya mutu sumber air.
7. Keterbatasan akses terhadap tanah. Indikator yang digunakan adalah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, ketidakpastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Akses terhadap tanah ini merupakan persoalan yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga petani.
8. Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam. Indikator yang digunakan adalah buruk nya kondisi lingkungan hidup, rendahnya sumber daya alam. Indikator ini sangat terkait dengan penghasilan yang bersumber dari sumber daya alam, seperti daerah perdesaan, daerah pesisir, dan daerah pertambangan.
9. Tidak adanya jaminan rasa aman, indikator ini berkaitan dengan tidak terjamin nya keamanan dalam menjalani kehidupan baik sosial maupun ekonomi.
-Keterbatasan akses untuk partisipasi. Indikator ini diukur melalui rendahnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan.
10. Besarnya beban kependudukan, indikator ini berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga, dan besarnya tekanan hidup.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Menurut Todaro (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat pendapatan nasional negara terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya berjalan lambat.
2. Pendapatan perkapita rendah dan pertumbuhannya sangat lambat atau bahkan stagnasi.
3. Terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.
4. Mayoritas penduduk hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi.
6. Fasilitas pendidikan dan kurikulum kurang memadai.

Sharp et al (2002) mengidentifikasi penyebab kemiskinan adalah:

1. Secara makro, kemiskinan terjadi karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang membuat distribusi pendapatan yang timpang, dimana penduduk miskin hanya mempunyai sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan terjadi karena perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah mengindikasikan produktivitas yang

rendah yang menyebabkan rendahnya upah. Kualitas sumber daya manusia yang rendah disebabkan pendidikan yang rendah, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.

3. Kemiskinan ada karena perbedaan akses modal. Nurkse (1953) menyebutkan bahwa ketiga penyebab kemiskinan di atas bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan, yaitu adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah menyebabkan rendahnya upah yang diterima yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berdampak pada keterbelakangan dan seterusnya.

Suroso (2006) menyebutkan kemiskinan yang terjadi di negara miskin disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Kemiskinan alami, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena keadaan alam suatu wilayah atau negara yang tidak subur dan tidak mempunyai sumber daya alam potensial. Namun, faktor ini mendapat kritikan.
2. Kemiskinan karena penjajahan. Negara yang mengalami penjajahan dalam waktu yang lama akan menjadi miskin karena diperas oleh penjajah. Namun, faktor ini juga mendapat kritikan.
3. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural. Kemiskinan ini turun temurun dari nenek moyang karena sulitnya merubah kebiasaan penduduk. Misalnya suku-suku di pedalaman.
4. Kemiskinan karena lokasi yang terisolasi. Kemiskinan daerah yang disebabkan karena daerah tersebut jauh dari perkotaan dan sulitnya jalur transportasi.
5. Kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan karena adanya perbedaan antara kota dengan desa dan adanya persaingan yang tidak seimbang antara daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dengan daerah yang tidak memiliki keunggulan komparatif.

Selain faktor-faktor di atas, kemiskinan pada suatu negara, juga disebabkan karena :

1. Mata pencaharian utama penduduk adalah pertanian
Negara yang mata pencaharian utama penduduknya pertanian akan menyebabkan negara tersebut miskin. Hal ini disebabkan produktivitas pertanian lebih rendah daripada sektor industri dan jasa, apalagi pertanian yang dilakukan penduduk masih bersifat tradisional dengan waktu lama dan harga jual yang kurang layak, menyebabkan rendahnya pendapatan dari sektor pertanian.
2. Ekonomi dualitas.
Perekonomian dualitas merupakan perekonomian yang berpusat pada dua pihak. Pihak pertama berpusat pada perekonomian pasar dan lainnya berekonomi pertanian. Ekonomi pasar mempunyai ciri modern, sedangkan ekonomi pertanian terbelakang. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan pendapatan pada penduduk kota dan desa.
3. Sumber alam yang kurang terolah
Sumber daya alam yang kurang terolah menyebabkan negara tidak mampu berkembang untuk mencari sumber daya alam yang baru.
4. Pengangguran dan pengangguran tersembunyi
Pengangguran yang berpendidikan muncul karena mereka tidak mampu memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya.

5. Ketiadaan inisiatif dan usaha
Tidak adanya inisiatif dan usaha dari masyarakat untuk melakukan inovasi dalam pekerjaannya menjadikan masyarakat di wilayah tersebut tidak bisa berkembang dan mampu meningkatkan pendapatannya.
6. Kelangkaan modal
Negara terbelakang mempunyai modal dan tabungan yang sangat kecil. Investasi bruto hanya sekitar 5-6% dari pendapatan nasional bruto, sedangkan negara industry mencapai kira-kira 15-20%.
7. Keterbelakangan teknologi termin dalam ongkos produksi yang tinggi, upah buruh rendah, besarnya jumlah tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih dan mahal nya barang-barang modal yang dipergunakan untuk memproduksi suatu produk.

Konsep Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index – P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (BPS ,2013). Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Penurunan nilai indeks Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Rumus penghitungannya sebagai berikut:

$$P_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^2$$

- P_1 : *Poverty Gap Index* atau Indeks Kedalaman Kemiskinan
 z : Garis Kemiskinan
 y_i : Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskian ($i= 1,2,...,q$), $y_i < z$
 q : Banyaknya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan
 n : Jumlah Penduduk

Indeks Pembangunan Manusia

Menurut BPS (2016), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak

Menurut Latifah (2017) Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya: Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana. Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar. Teori *Human capital* berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat, antara lain: diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan dan tambahan pendapatan seseorang apabila mampu menyelesaikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya. Pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan dunia secara global. Untuk itu, pendidikan harus dapat menyiapkan generasi muda abad ke-21 yang unggul, berdaya saing tinggi dan mampu bekerjasama guna mencapai kemakmuran bagi setiap negara dan dunia.

Rahmat dan Bachtiar (2017) IPM ini juga disebut Human Development Indeks yang pertama kali dikembangkan Amarta Sen peraih nobel asal India dan Seorang ekonom asal Pakistan yang bernama Mahbub ul Haq. IPM adalah suatu komposit yang mengukur tingkat rata-rata pencapaian sebuah negara, ada 3 hal dasar suatu pembangunan manusia, yaitu *pertama*, panjang kehidupan (*length of life*) dengan mengukur angka harapan hidup sejak lahir; *kedua*, pendidikan (*education*) dengan mengukur dan mengkombinasikan pada jumlah orang dewasa yang melek huruf (dengan dua pertiga berat badan) dan rata-rata lamanya sekolah (dengan bobot sepertiga); *ketiga*, standar hidup yang layak, dengan mengukur pengeluaran rata-rata penduduk yang telah ditentukan (PPP Rupiah). Cara menghitung IPM digunakan rumus sebagai berikut:

$$IPM = (\text{Index } X_1 + \text{Index } X_2 + \text{Index } X_3) \dots \dots \dots (2.1)$$

Dimana:

X_1 = Harapan hidup (*length of life*)

X_2 = Tingkat pendidikan (*education*)

X_3 = Standar hidup yang layak (*decent standard of living*)

Komponen-komponen IPM

1. Indeks Harapan hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel e_0 diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

2. Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah

penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

3. Indeks Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan concern IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (Purchasing Power Parity).

Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

Lembaga UNDP telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut *Human Development Indeks* (HDI). Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan SDM yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan SDM secara sempurna.

Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut:

- *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau *life expectancy of birth* dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau *infant mortality rate*.
- *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (*the mean years of schooling*).
- *Access to resource*, dapat diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Dalam melakukan pembangunan manusia tentunya tidak hanya memperhatikan pada tiga komponen yang menjadi tolok ukur dalam penentuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saja, disamping hal-hal tersebut tentunya masih banyak aspek lain yang juga mempengaruhi yaitu dari berbagai aspek pembangunan manusia yang tidak dapat diukur seperti; moral, mental, spiritual, tanggung jawab dan lain sebagainya. Untuk itu dalam upaya mencapai kesejahteraan secara utuh kita jangan hanya terjebak untuk memprioritaskan pada peningkatan di tiga aspek yang menjadi tolok ukur IPM saja, tetapi juga perlu meningkatkan kualitas manusia dari aspek-aspek yang lainnya.

Angka harapan hidup adalah perkiraan jumlah tahun hidup di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu. Angka harapan hidup merupakan cermin dari

kondisi kesehatan penduduk yang memiliki kemampuan bertahan hidup atau umur lebih lama karena kesehatannya lebih baik.

Melek aksara atau melek huruf dalam arti sempit adalah kemampuan membaca dan menulis. Sedang dalam arti luas melek aksara adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Selain itu juga diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Dalam perkembangan modern kata ini lalu diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca-tulis, sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pendidikan penduduk maka perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan adalah usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.

Standar hidup menunjuk ke kualitas dan kuantitas barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia bagi orang. Biasanya diukur oleh pendapatan nyata per orang, meskipun beberapa pengukuran lain dapat digunakan; contohnya adalah ketersediaan barang (seperti jumlah kulkas per 1000 orang), atau pengukuran kesehatan seperti harapan hidup.

Ide standar ini dapat berlawanan dengan kualitas hidup, yang memperhitungkan tidak hanya standar hidup material, tetapi juga faktor subyektif lainnya yang menyumbang bagi kehidupan seseorang, seperti hiburan, keamanan, sumber budaya, kehidupan sosial, kesehatan mental, dll. Cara yang lebih rumit untuk menghitung kesejahteraan harus digunakan untuk membuat keputusan semacam itu, dan seringkali hal ini bersangkutan dengan politik, dan oleh sebab itu kontroversial.

Menurut Todaro (2006) pembangunan manusia ada tiga komponen universal sebagai tujuan utama meliputi:

- a) Kecukupan, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan keterbelakangan absolut.
- b) Jati Diri, yaitu merupakan komponen dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai dirisendiri, untuk merasa diri pantas dan layak mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semuanya itu terangkum dalam *self esteem* (jati diri).
- c) Kebebasan dari Sikap Menghamba, yaitu merupakan kemampuan untuk memiliki nilai universal yang tercantum dalam pembangunan manusia adalah kemerdekaan manusia. Kemerdekaan dan kebebasan di sini diartikan sebagai kemampuan berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran dari aspek-aspek materil

dalam kehidupan. Dengan adanya kebebasan kita tidak hanya semata-mata dipilih tapi kitalah yang memilih.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data sekunder. Metode analisis data sekunder adalah suatu metode dalam menganalisis suatu permasalahan atau fenomena dalam ekonomi dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan, diolah, disajikan dan dilaporkan oleh pihak lain (Nasir, 2011). Metode pengumpulan data sekunder sering disebut dengan penggunaan bahan dokumen. Karena dalam hal ini peneliti tidak langsung melakukan penelitian sendiri tetapi meneliti dan memanfaatkan data yang telah dihasilkan oleh pihak lain.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Analisis Deskriptif adalah analisis data yang dilakukan dengan cara merumuskan dan mengumpulkan data, mengklasifikasikan serta menginterpretasikan sehingga memberikan suatu keterangan gambaran yang ada. Masalah tersebut dianalisis menggunakan teori. Analisis kuantitatif adalah analisis yang digunakan untuk melihat secara empiris sejauh mana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Menganalisis perkembangan kemiskinan dilakukan secara deskriptif, untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap indeks kedalaman kemiskinan dilakukan secara kuantitatif dengan bantuan software EvIEWS dengan metode analisis regresi data panel.

Analisis Deskriptif

Dalam menjawab permasalahan pertama maka digunakan analisis deskriptif kualitatif digunakan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan variabel yang digunakan dalam penelitian. Untuk menghitung besarnya perkembangan

Regresi Data Panel

Untuk menjawab permasalahan kedua maka digunakan Analisis kuantitatif untuk mengetahui besarnya pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap indeks kedalaman kemiskinan maka dianalisa menggunakan persamaan regresi data panel. Untuk menguji permodelan regresi data panel ketiga estimasi model regresi dengan melakukan Uji Chow dan Uji Hausman yang ditujukan untuk menentukan apakah model data panel dapat diregresi dengan metode *Common Effect*, metode *Fixed Effect*, atau metode *Random Effect*. (Juanda, Bambang dan Junaidi.2012).

Dalam analisis ekonometrika pemilihan model merupakan salah satu langkah yang penting disamping pembentukan model teoritis dan model yang ditaksir, estimasi, pengujian hipotesis, peramalan, dan analisis mengenai implikasi dan kebijakan dari model tersebut. Dalam model data panel persamaan model dengan menggunakan data *time series* dan *cross section* yaitu :

$$IKK_i = F (IPM) \dots\dots\dots(3.3)$$

Dimana :

IKD = Indeks Kedalaman Kemiskinan

IPM = Indeks Pembangunan Manusia
 Model fungsi diatas dispesifikasi menggunakan pendekatan regresi data panel menjadi :

$$IKK_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{1it} + e \dots\dots(3.4)$$

Dimana :

IKD = Indeks Kedalaman Kemiskinan
 IPM = Indeks Pembangunan Manusia
 i = jumlah observasi (kab-kota) = 11
 t = Tahun data observasi (Tahun/deret waktu)
 β_0 = konstanta
 β_i = koefisien (banyaknya peubah bebas)
 e = error

Pendekatan-Pendekatan dalam Regresi Data Panel

Ada tiga pendekatan dalam perhitungan model regresi data panel, yaitu :

1. Metode *Common- Constant (Pooled Ordinary Least Square/PLS)*

Pendekatan ini menggunakan metode OLS biasa. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana. Dalam estimasinya diasumsikan bahwa setiap unit individu memiliki intersep dan slope yang sama. Dengan kata lain, regresi panel data yang dihasilkan akan berlaku untuk setiap individu (Juanda dan Junaidi, 2012). Pada beberapa penelitian data panel, model ini sering kali tidak pernah digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya bias, namun model ini digunakan sebagai perbandingan dari kedua pemilihan model.

2. Metode *Fixed Effect (Fixed Effect Model/FEM)*

Pada metode ini, intersep pada regresi dapat dibedakan antar individu karena setiap individu dianggap mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam membedakan intersepanya dapat digunakan Variable dummy, sehingga metode ini juga dikenal dengan model *Least Square Dummy Variable (LSDV)* (Juanda dan Junaidi, 2012). Pada metode *Fixed Effect* estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (*no weight*) atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)* dan dengan pembobot (*cross section weight*) atau *General Least Square (GLS)*. Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenites antar unit cross section. Penggunaan model ini tepat untuk melihat perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasi data. Pemilihan model antara *Common Effect* dengan *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan pengujian *Likelihood Test Ratio* dengan ketentuan apabila nilai probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat diambil keputusan dengan menggunakan *Fixed Effect Model*.

3. Metode *Random Effect (Random Effect Model/REM)*

Model data panel pendekatan ketiga yaitu model efek acak (*random effect*). Dalam model efek acak, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam *error (error component model)*. Dengan menggunakan model efek acak ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan jadi semakin efisien. Keputusan penggunaan model efek tetap ataupun acak ditentukan dengan menggunakan Uji Husman. Dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan

alpha maka dapat digunakan metode *Fixed Effect*, namun apabila sebaliknya maka dapat memilih salah satu yang terbaik antara *Fixed Effect* dengan *Random Effect*.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk menguji permodelan regresi data panel ketiga estimasi model regresi dengan melakukan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji *Lagrange Multiplier* yang ditujukan untuk menentukan apakah model data panel dapat diregresi dengan metode *Common Effect*, metode *Fixed Effect*, atau metode *Random Effect*. (Widarjono, 2006).

Chow test merupakan uji untuk membandingkan model *common effect* dengan *fixed effect* (Widarjono, 2009). Chow test dalam penelitian ini menggunakan program *Eviews*. Pengujian yang dilakukan menggunakan *Chow-test* atau *Likelihood ratio test*, dengan asumsi yaitu:

H_0 : model mengikuti *Pool*

H_1 : model mengikuti *Fixed*.

H_0 ditolak jika *P-value* lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya, H_0 diterima jika *P-value* lebih besar dari nilai α . Nilai α yang digunakan sebesar 10%.

Hausman Test adalah pengujian yang membandingkan model *fixed effect* dengan *random effect* dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel (Gujarati, 2012). Hausman test menggunakan program yang serupa dengan Chow test yaitu program *Eviews*. Pengujian yang dilakukan menggunakan Hausman test dengan asumsi, yaitu:

H_0 : model mengikuti *Random Effect*

H_1 : model mengikuti *Fixed Effect*.

H_0 ditolak jika *P-value* lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya, H_0 diterima jika *P-value* lebih besar dari nilai α . Nilai α yang digunakan sebesar 10%.

Pengujian yang dilakukan dengan Uji *Lagrange Multiplier* dengan asumsi apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect*. Hipotesis yang dibentuk dalam LM test adalah sebagai berikut :

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

H_0 ditolak jika *P-value* lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya, H_0 diterima jika *P-value* lebih besar dari nilai α . Nilai α yang digunakan sebesar 10%.

Pengujian Hipotesis

Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Untuk pengujian secara simultan (uji F) digunakan hipotesis sebagai berikut :

- $H_0 : \beta_{1...n} = 0$, semua variabel bebas secara bersama- sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
- $H_1 : \beta_{1...n} \neq 0$, semua variabel bebas secara bersama- sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai p-value atau prob(F-statistik) dengan $\alpha = 1\%, 10\%, 10\%$. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

- Jika p-value $< \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y.
- Jika p-value $> \alpha$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y.

Secara Parsial dengan Menggunakan Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsial dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian secara parsial menggunakan hipotesis sebagai berikut :

- $H_0 : \beta = 0$, tidak ada pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.
- $H_1 : \beta \neq 0$, ada pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai p-value atau prob(t-statistik) dengan $\alpha = 1\%, 10\%, 10\%$. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

- Jika p-value $< \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan.
- Jika p-value $> \alpha$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

Jumlah penduduk yang cukup besar di kabupaten/kota Provinsi Jambi dapat menjadi potensi ataupun permasalahan jika tidak dibarengi dengan kualitas yang baik. Pembangunan manusia menjadi satu diantara tolak ukur pembangunan yang ada di suatu wilayah. Dengan demikian maka indeks pembangunan manusia merupakan tolak ukur yang sangat baik untuk melihat pembangunan di suatu wilayah. Berikut ini adalah data indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Jambi.

Tabel 4.1 Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota Provinsi Jambi 2010-2021

Kabupaten /Kota	Tahun												Rata-Rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kerinci	65,16	65,85	66,71	67,50	68,00	68,90	69,70	70,00	70,60	71,00	71,20	71,45	68,84
Merangin	63,85	64,40	65,31	65,80	66,20	67,40	67,90	68,30	68,80	69,10	69,20	69,53	67,15
Sarolangun	64,64	65,20	66,16	67,10	67,70	68,10	68,70	69,00	69,40	69,70	69,90	70,25	67,99
Batang Hari	65,67	66,32	66,97	67,20	67,70	68,10	68,70	68,90	69,30	69,70	69,80	70,11	68,21
Muaro Jambi	62,84	63,39	64,17	65,10	65,70	66,70	67,60	67,90	68,30	69,00	69,20	69,55	66,62
Tanjabtim	57,21	57,77	58,63	59,40	59,90	61,10	61,90	62,60	63,30	63,90	64,40	64,91	61,25
Tanjabbar	61,49	61,98	62,86	63,50	64,00	65,00	65,90	66,20	67,10	67,50	67,50	68,16	65,10
Tebo	63,62	64,45	65,23	65,90	66,60	67,30	68,10	68,20	68,70	69,00	69,10	69,35	67,13
Bungo	66,28	66,70	67,20	67,50	67,90	68,30	68,80	69,00	69,40	69,90	69,90	70,15	68,42
Kota Jambi	72,23	72,96	73,78	74,20	74,90	75,60	76,10	76,70	77,40	78,30	78,40	79,12	75,81
Kota Sungai Penuh	69,91	70,55	71,23	72,10	72,50	73,00	73,40	73,80	74,70	75,40	75,40	75,70	73,14
Provinsi Jambi	65,39	66,14	66,94	66,90	67,40	68,10	68,80	69,10	69,70	70,20	70,40	71,63	68,39

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa IPM di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2010 sampai tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata IPM tertinggi terjadi di Kota Jambi yaitu sebesar 75,81 dengan kategori sedang. Tingginya IPM pada Kota Jambi ditunjukkan dengan tingginya rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan tingkat kehidupan yang layak di wilayah ini. Sedangkan IPM terendah tercatat pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan IPM hanya sebesar 61,25 dan juga pada kategori sedang, rendahnya IPM pada Kabupaten Tanjung Jabung

Timur karena kualitas pendidikan yang rendah dan kesejahteraan masyarakat yang rendah.

Analisis Indeks Kedalaman Kemiskinan

Dapat dilihat pada tabel 4.2 yang menggambarkan kondisi indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama 11 tahun terakhir yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2021 dilihat tingkat kemiskinan. Jika dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan terdapat adanya perbedaan kondisi kemiskinan masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Pada periode 2010-2021, rata-rata indeks kedalaman kemiskinan tertinggi terjadi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan rata-rata indeks kedalaman kemiskinan selama dua belas tahun terakhir sebesar 1,93 persen, artinya rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 1,93 persen. Tingginya kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena perbedaan dalam pekerjaan. Penduduk yang memiliki lahan perkebunan dan penduduk yang bekerja sebagai PNS dan swasta lebih besar penghasilannya dibanding penduduk yang bekerja sebagai nelayan. Pada periode tahun 2010-2021, rata-rata indeks kedalaman kemiskinan terendah terjadi pada Kabupaten Bungo dengan indeks kedalaman kemiskinan selama dua belas tahun terakhir hanya sebesar 0,79 persen, artinya rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Bungo sebesar 0,79 persen. Rendahnya kemiskinan di Kabupaten Bungo karena wilayah ini perekonomian daerahnya lebih baik dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi lainnya yang ditunjukkan dengan pendapatan perkapita yang tinggi. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami fluktuatif.

Tabel 4.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Jambi, 2010-2021 (Persen)

Kabupaten /Kota	Tahun (Persen)												Rata-Rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kerinci	1,18	1,00	0,97	1,16	1,12	1,42	1,47	1,28	1,3	1,23	1,1	1,29	1,21
Merangin	0,85	0,92	1,19	1,49	1,10	1,30	0,92	1,56	0,72	0,59	1,05	0,81	1,04
Sarolangun	1,61	1,34	1,44	1,63	1,39	1,57	1,77	1,69	1,86	1,39	0,94	1,25	1,49
Batanghari	1,18	1,20	1,36	0,95	1,08	1,08	1,37	2,2	1,49	1,17	1,08	1,13	1,27
Muaro Jambi	0,56	0,43	0,45	0,50	0,95	1,96	1,29	1,86	1,24	1,29	1,28	1,27	1,09
Tanjabtim	1,22	1,84	1,66	1,67	0,44	0,61	0,49	0,45	0,68	0,39	0,31	0,47	0,85
Tanjabbar	2,03	1,47	1,32	1,94	1,92	1,98	2	2,98	2,19	1,75	1,45	2,07	1,93
Tebo	0,87	0,75	0,93	0,67	1,82	2,15	1,61	2,35	1,7	1,68	1,58	1,96	1,51
Bungo	0,70	0,52	0,61	0,68	0,69	0,70	0,96	0,87	0,95	1,07	0,7	0,99	0,79
Kota Jambi	1,86	1,21	1,52	1,23	0,58	0,64	0,97	1,19	0,62	0,81	0,72	0,92	1,02
Sungai Penuh	0,46	0,30	0,53	0,38	0,98	1,36	1,59	1,13	1,26	1,52	1,47	1,42	1,03
Provinsi Jambi	1,21	1,02	1,37	1,12	0,39	0,53	0,26	0,23	0,26	0,25	0,62	0,43	0,64

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional 2022

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan pada kabupaten/kota Provinsi Jambi

Metode yang akan dipakai dalam penelitian terlebih dahulu melakukan uji hipotesis penentuan model. Berdasarkan output Eviews tersebut menunjukkan bahwa baik F test maupun Chi-Square signifikan (Prob. 0,0000 dan 0,0000 lebih kecil dibandingkan 0,05 atau alfa 5 persen), sehingga model ini hipotesis Ho ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik dibandingkan model PLS.

Sehingga pengujian berikutnya yaitu dengan membandingkan metode FEM atau REM dengan melakukan uji *hasuman*. *Hausman Test* (Uji Hausman) dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara FEM dan REM. Berikut ini akan ditampilkan hasil pengujian tersebut:

Tabel 4.3. Uji Chow untuk memilih antara model PLS dengan FEM

Redundant Fixed Effects Tests
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	26.983995	(10,32)	0.0000
Cross-section Chi-square	98.743085	10	0.0000

Sumber: Data Diolah, Eviews 9 (2023)

Tabel 4.4. Uji Hausman untk memilih antara model FEM dengan REM

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.379178	1	0.1230

Sumber: Data Diolah, Eviews 9 (2023)

Berdasarkan output Eviews tersebut menunjukkan bahwa nilai statistic Chi-Square memiliki Prob lebih kecil dibandingkan alfa 5 persen ($0,1230 > 0,05$), sehingga hipotesis H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model REM lebih baik dibandingkan FEM. Selanjutnya pengujian Uji *Lagrange Multiplier* untuk menentukan metode yang terbaik antara PLS dan REM. Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara PLS dan REM.

Tabel 4.5 Uji *Lagrange Multiplier* untuk memilih antara model PLS dengan REM

Lagrange multiplier (LM) test for data panel
Total panel observations: 132

Null (no rand.eff) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	113.2995 (0.0000)	0.003863 (0.9504)	113.3034 (0.0000)
Honda	10.64422 (0.0000)	-0.062149 (0.5248)	7.482657 (0.0000)
King- Wu	10.64422 (0.0000)	-0.062149 (0.5248)	6.094701 (0.0000)
GHM	-- --	-- --	113.2995 (0.0000)

Sumber: Data Diolah, Eviews 9 (2022)

Dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa nilai Prob. Breusch-Pagan (BP) sebesar 0,0000 (pada kolom ketiga yaitu "Both"). Sesuai hipotesis, jika Prob BP (0,0000) < 0,1 maka H0 ditolak, dengan kata lain model yang cocok adalah Random Effect Model.

Berdasarkan hasil dari ketiga uji untuk menentukan model, model yang paling banyak muncul adalah model REM. Maka penelitian ini telah ditetapkan menggunakan estimasi model REM.

Hasil Pengujian Estimasi Model REM

Hasil estimasi persamaan data panel tentang pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Estimasi *Random Effects Model* (REM)

Included observations: 12

Cross-sections included: 11

Total pool (balanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.607037	0.372589	23.10062	0.0000
IPM?	-6.256794	0.616679	-10.14596	0.0000
_KERINCI--C	-0.510675			
_MERANGIN--C	-0.518712			
_SAROLANGUN--C	-0.467806			
_BATANGHARI--C	-0.265068			
_MUAROJAMBI--C	0.008965			
_TANJABTIM--C	0.123312			
_TANJABBAR--C	0.218651			
_TEBO--C	0.308540			
_BUNGO--C	0.560233			
_KOTAJAMBI--C	0.777394			
_SUNGAIPENUH—C	-0.234833			
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.439675	0.8763
Idiosyncratic random			0.165176	0.1237
Weighted Statistics				
R-squared	0.703531	Mean dependent var	0.938409	
Adjusted R-squared	0.696473	S.D. dependent var	0.304694	
S.E. of regression	0.167866	Sum squared resid	1.183521	
F-statistic	99.66760	Durbin-Watson stat	0.979252	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.831907	Mean dependent var	5.083182	
Sum squared resid	9.261199	Durbin-Watson stat	0.125142	

Sumber: Data Diolah, Eviews 9 (2023)

Uji Hipotesis

Uji R²

Dapat dilihat pada Tabel 4.6 bahwa nilai R-Squared adalah sebesar 0,7035 artinya bahwa variabel Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat korelasinya sebesar 70,35 persen.

Uji t Statistik

Untuk menguji signifikansi pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi secara parsial maka digunakan uji t statistik. Uji t Statistik berguna untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel Independen terhadap variabel dependen secara parsial. Tingkat kepercayaan 95 persen dengan uji dua arah dan dapat diterangkan hasil uji t statistik sebagai berikut :

Jika dilihat dari *Prob* Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,0000 karena *Prob* < 0,05, maka *H*₀ ditolak dan *H*_a diterima. Ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Estimasi Model REM

Estimasi Koefisien Variabel Model REM

Berdasarkan hasil estimasi tingkat pendidikan tabel 4.6 tersebut dapat diketahui penjelasan masing-masing variabel dalam penelitian yaitu Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat dijelaskan persamaan model sebagai berikut:

$$IKK_{it} = 8,607 - 6,256IPM_{it} + e_{it}$$

Berdasarkan Persamaan Model diatas dapat dijelaskan hasil estimasi terhadap *random effect* adalah jika tidak terjadi perubahan atau konsisten antara Indeks Pembangunan Manusia baik antar wilayah maupun antar waktu, maka nilai konstanta sebesar 8,607 Hal ini berarti apabila Indeks Pembangunan Manusia tetap maka Indeks Kedalaman Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebesar 8,607 persen.

Selanjutnya nilai koefisien Indeks Pembangunan Manusia sebesar -6,256. Hal ini diartikan jika Indeks Pembangunan Manusia meningkat satu persen maka Indeks Kedalaman Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi menurun sebesar 6,256 persen.

Estimasi Koefisien Model REM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Dari hasil estimasi dengan menggunakan *Random Effect Model* dapat dijelaskan bahwa masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi memiliki nilai intersep yang berbeda-beda. Individual fixed *effect* dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.7 Estimasi Individual Effects Model REM

Kabupaten/Kota	Random Effect
Kerinci	-0.510675
Merangin	-0.518712
Sarolangun	-0.467806
Batang Hari	-0.265068
Muaro Jambi	0.008965
Tanjung Jabung Timur	0.123312
Tanjung Jabung Barat	0.218651
Tebo	0.308540
Bungo	0.560233

Kota Jambi	0.777394
Kota Sungai Penuh	-0.234833

Sumber: Data Diolah, Eviews 9 (2022)

Berdasarkan estimasi tersebut dapat dilihat bahwa nilai *individual effect* dalam hasil estimasi metode REM adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Kerinci

Jika terjadi perubahan Indeks Pembangunan Manusia baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Kabupaten Kerinci akan mendapatkan pengaruh individual terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar -0.510675 persen.

2. Kabupaten Merangin

Jika terjadi perubahan Indeks Pembangunan Manusia baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Kabupaten Kerinci akan mendapatkan pengaruh individual terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar -0.518712 persen.

3. Kabupaten Sarolangun

Jika terjadi perubahan Indeks Pembangunan Manusia baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Kabupaten Sarolangun akan mendapatkan pengaruh individual terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar -0.467806 persen.

4. Kabupaten Batanghari

Jika terjadi perubahan Indeks Pembangunan Manusia baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Kabupaten Batanghari akan mendapatkan pengaruh individual terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar -0.265068 persen.

5. Kabupaten Muaro Jambi

Jika terjadi perubahan Indeks Pembangunan Manusia baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Kabupaten Muaro Jambi akan mendapatkan pengaruh individual terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0.008965 persen.

6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Jika terjadi perubahan Indeks Pembangunan Manusia baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mendapatkan pengaruh individual terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0.123312 persen.

7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Jika terjadi perubahan Indeks Pembangunan Manusia baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mendapatkan pengaruh individual terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0.218651 persen.

8. Kabupaten Tebo

Jika terjadi perubahan Indeks Pembangunan Manusia baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Kabupaten Tebo akan mendapatkan pengaruh individual terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0.308540 persen.

9. Kabupaten Bungo

Jika terjadi perubahan Indeks Pembangunan Manusia baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Kabupaten Bungo akan mendapatkan pengaruh individual terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0.560233 persen.

10. Kota Jambi

Jika terjadi perubahan Indeks Pembangunan Manusia baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Kota Jambi akan mendapatkan pengaruh individual terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0.777394 persen.

11. Kota Sungai Penuh

Jika terjadi perubahan Indeks Pembangunan Manusia baik antar wilayah maupun antar waktu, maka Kota Sungai Penuh akan mendapatkan pengaruh individual terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar -0.234833 persen.

Analisis Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi pada model FEM disebutkan nilai koefisien Indeks Pembangunan Manusia sebesar -6,256. Hal ini diartikan jika Indeks Pembangunan Manusia meningkat satu persen maka indeks kedalaman kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi menurun sebesar 6,256 persen. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap indeks kedalaman kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Hasil ini sependapat dengan Lanjouw et al.(2001) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Hasil penelitian ini juga sependapat dengan Suliswanto (2010) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Berpengaruhnya indeks pembangunan manusia terhadap indeks kedalaman kemiskinan disebabkan dasar peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat itu diawali dari peningkatan kualitas mereka dan faktor yang mempengaruhi kualitas masyarakat secara luas adalah faktor pendapatan, faktor pendidikan dan faktor kesehatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2010 sampai tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang terus mengalami peningkatan. Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2010 sampai tahun 2021 dimana setiap tahunnya tingkat kemiskinan cenderung mengalami fluktuasi.
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Saran

1. Pemerintah daerah harus mempertajam program-program untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan memperbanyak program peningkatan indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Jambi.
2. Diperlukan kebijakan strategis yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Provinsi Jambi untuk pemanfaatan alokasi dana pemerintah guna pengembangan mutu pendidikan baik yang bersifat umum, maupun kepada jenis pendidikan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan keahlian antara lain melalui dana CSR (Corporate social responsibility) dari pihak swasta berbasis ketersediaan hamparan SDA (Sumber Daya Alam) Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmaddien, Iskandar. 2019. Faktor determinan keparahan dan kedalaman kemiskinan jawa barat dengan regresi data panel. Forum Ekonomi. 21 (1) 87-96

- Bappenas, 2004, *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan)*, Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Chambers, 1998. *Rural Development Putting the Last First*. Published by Longmann. Inc. UK
- Haughton, Jonathan dan Khandker Shahidur R. 2012. *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Juanda, Bambang dan Junaidi. 2012. *ekonometrika deret waktu*. Bogor: IPB Press
- Kuncoro, Mudrajat. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Lanjouw et al. (2001), *Poverty Education and health in Indonesia: Who Benefit From Public Spending*. World Bank Discussion Paper, Washington.
- Latifah, E. (2017). Harmonisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Yang Berorientasi pada Millenium Development Goals. *Jurnal Dinamika Hukum*. 11(3), 391-401
- Leonita, L. Sari, RK. 2019. Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. 3 (2) 1-8
- Mulyaningsih, Y. (2008). *Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik terhadap peningkatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan*. Tesis: Universitas Indonesia
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184-192
- Sastraatmadja, Entang. 2007. *Dampak Sosial Pembangunan*. Bandung: Angkasa
- Suharto, Edi. 2010, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung Alfabeta.
- Suryawati, 2005, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional (Understanding Multidimension Of Poverty)*, Semarang : Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, JMPK Vol. 08/No.03/September/2005
- Todaro, Michael P. 2006. "Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga". Alih Bahasa: Amminudin dan Drs. Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesebelas Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga